



Analisis Proses Pengelolaan Arsip Dinamis Di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

Dian Lestari¹, Tri Oktarina²,

Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bina Darma, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 April 2025

Revised: 21 April 2025

Accepted: 29 April 2025

Keywords:

Pengelolaan Arsip Dinamis,
Sistem SRIKANDI,
Kearsipan pemerintahan

Published by

Impression: Jurnal Teknologi dan Informasi
Copyright © 2023 by the Author(s) | This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat implementasi pengelolaan arsip dinamis berbasis digital pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses penerapan sistem tersebut. Arsip dinamis memiliki peran strategis dalam mendukung sistem administrasi pemerintahan, karena berfungsi sebagai sumber informasi, alat bukti hukum, dan dasar dalam pengambilan keputusan. Melalui penerapan sistem digital seperti SRIKANDI, diharapkan proses penciptaan, penyimpanan, pengelolaan, hingga penemuan kembali arsip dapat berjalan secara lebih efisien, cepat, dan aman. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti kurangnya kompetensi teknis aparatur dalam mengoperasikan sistem, keterbatasan perangkat dan infrastruktur teknologi, serta belum maksimalnya pelaksanaan prosedur operasional standar secara menyeluruh di setiap bidang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara kebijakan digitalisasi arsip yang ditetapkan dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi pengembangan sistem pengelolaan arsip yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

This study was conducted with the aim of evaluating the level of implementation of digital-based dynamic archive management at the South Sumatra Provincial Archives Service, as well as identifying various obstacles that arise during the process of implementing the system. Dynamic archives have a strategic role in supporting the government administration system, because they function as a source of information, legal evidence, and a basis for decision making. Through the implementation of a digital system such as SRIKANDI, it is hoped that the process of creating, storing, managing, and rediscovering archives can run more efficiently, quickly, and safely. However, implementation in the field still faces a number of obstacles, such as the lack of technical competence of the apparatus in operating the system, limited technological devices and infrastructure, and the less than optimal implementation of standard operating procedures in every field. This study also aims to analyze the suitability between the established archive digitization policy and the factual conditions in the field, so that it can be a basis for formulating recommendations for developing a more modern, professional, and sustainable archive management system in supporting effective governance

Corresponding Author:

Dian Lestari

Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bina Darma, Indonesia

Jl. Gunung Anyar Lor No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Email: dianlestarid102@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era transformasi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan arsip di instansi pemerintahan. Sistem pengelolaan arsip yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan utama agar informasi yang tersimpan dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan dipelihara dengan baik. Menurut Rahayu (2023), penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip terbukti mempercepat proses pelayanan administrasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Salah satu implementasi penting adalah penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang resmi diterapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2021. Aplikasi ini mampu mempercepat proses pencatatan, pencarian, dan pemulihan data yang sebelumnya memerlukan waktu lama jika dilakukan secara manual (Rofiqoh, 2022). Selain itu, sistem digital juga memungkinkan penghematan ruang penyimpanan fisik, mengurangi risiko kerusakan arsip akibat faktor lingkungan, serta meningkatkan keamanan data dari potensi kehilangan atau manipulasi (Yuliani, 2021). Efektivitas ini berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi karena proses administrasi berjalan lebih lancar dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih responsif (Putri, 2023). Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan arsip dinamis bukan hanya sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi setiap lembaga pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas tata kelola administrasi secara profesional, modern, dan akuntabel (Kurniawan, 2022).

Menurut Nasution (2024), Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan pengelolaan arsip secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan kearsipan di wilayah provinsi, dinas ini bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kearsipan, baik yang berkaitan dengan arsip dinamis maupun arsip statis. Fungsi-fungsi Dinas Kearsipan meliputi penyusunan program kearsipan daerah, pelaksanaan pengelolaan arsip aktif dan inaktif, pemberian bimbingan teknis kepada unit kerja pemerintah, pengawasan pelaksanaan sistem kearsipan di seluruh instansi daerah, serta pelestarian arsip yang memiliki nilai sejarah bagi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, dinas ini juga berperan dalam menyelamatkan arsip-arsip penting dari ancaman kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan publik dan pemerintah daerah. Melalui tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam membangun budaya tertib arsip di lingkungan pemerintahan daerah serta memastikan bahwa arsip sebagai sumber informasi, alat pertanggungjawaban, dan memori kolektif masyarakat tetap terjaga dengan baik. Menurut Olvanadia (2022), efektivitas tata kelola arsip dinamis di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan hasil yang positif dalam proses temu kembali informasi, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur

Menurut Aulia Nurul Rahmadini (2023), Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam menjamin tata kelola arsip yang baik di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas di bidang kearsipan, dinas ini bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip secara menyeluruh, baik arsip dinamis yang masih digunakan dalam proses administrasi sehari-hari maupun arsip statis yang telah menjadi dokumen sejarah dan memori kolektif masyarakat. Sebagai pusat kegiatan kearsipan, Dinas Kearsipan juga bertugas menetapkan standar, pedoman, dan prosedur yang wajib diikuti oleh seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan arsip agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, lembaga ini juga memegang peran sebagai penjaga keaslian, keamanan, dan kelestarian arsip, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, maupun sejarah di masa yang akan datang. Dengan peran tersebut, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan menjadi garda terdepan dalam membangun budaya tertib arsip, meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data arsip yang

akurat, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional di era digital saat ini.

Masalah yang terjadi dalam pengelolaan arsip dinamis di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan penerapan sistem digital adalah ketidakselarasan antara pengelolaan arsip manual yang masih berlangsung dan penerapan sistem digital yang baru. Meskipun sudah ada upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan arsip, masih terdapat tantangan besar dalam hal pelatihan dan kesiapan sumber daya manusia untuk mengoperasikan sistem digital secara optimal. Banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi kearsipan digital, yang menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, pengarsipan, dan pencarian arsip. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang memadai, turut menghambat kelancaran implementasi sistem digital. Hal ini menyebabkan proses pengelolaan arsip menjadi tidak efisien, berisiko terhadap kehilangan data, serta mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penerapan teknologi ini agar dapat memaksimalkan manfaat digitalisasi arsip (Riyadi, A., & Nurhadi, D. 2022; Putra, I.G.N.A. et al., 2023; Wulandari, D. & Prasetyo, Y., 2024).

Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, serta mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Dalam hal ini, pengelolaan arsip dinamis harus melalui sistem yang terintegrasi secara digital untuk memudahkan pencatatan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip. Selain itu, dalam PP No. 28 Tahun 2012 tentang Sistem Kearsipan Nasional, ditegaskan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan arsip, baik arsip aktif maupun inaktif, harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan keamanan arsip serta mendukung keberlanjutan proses administrasi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan sistem digital dalam pengelolaan arsip dinamis diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peraturan tersebut, meningkatkan tata kelola arsip yang lebih baik, dan mempercepat transformasi administrasi pemerintahan di era digital.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam pengelolaan arsip dinamis di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, beberapa langkah penyelesaian yang dapat diambil meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan perbaikan infrastruktur pendukung. Pertama, diperlukan pelatihan yang lebih intensif dan berkesinambungan bagi para pegawai dalam mengoperasikan sistem digital yang telah diterapkan. Hal ini akan memastikan bahwa pengelolaan arsip dilakukan dengan lebih efisien dan meminimalisir kesalahan yang terjadi akibat ketidaktahuan. Kedua, untuk mendukung kelancaran proses digitalisasi, perlu adanya peningkatan pada infrastruktur, termasuk perangkat keras yang lebih canggih dan penyempurnaan jaringan internet yang lebih stabil. Ketiga, untuk memastikan sistem digital yang diterapkan tetap relevan dan efektif, perlu adanya evaluasi dan pembaruan berkala terhadap aplikasi kearsipan yang digunakan. Terakhir, pengembangan prosedur standar operasional (SOP) yang jelas dan implementasi pengawasan yang ketat akan membantu memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan arsip dinamis digital dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan arsip dapat berjalan lebih lancar, aman, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel (Sari & Wibowo, 2022; Hasanah et al., 2023; Pratama & Nugroho, 2024).

Peralihan dari pengelolaan arsip konvensional menuju digitalisasi merupakan transformasi yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam dunia kearsipan. Di masa lalu, pengelolaan arsip dilakukan secara manual, dengan dokumen fisik yang memerlukan ruang penyimpanan yang luas dan rentan terhadap kerusakan serta kehilangan. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, banyak lembaga, termasuk Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, mulai beradaptasi dengan sistem digital untuk mengelola arsip mereka. Perubahan ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas arsip. Melalui digitalisasi, arsip dapat diakses dengan cepat, disimpan dengan aman, dan dipelihara lebih terjamin, sementara risiko kesalahan manusia dapat diminimalisir. Selain itu, digitalisasi memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan arsip, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih responsif. Di era informasi ini, peralihan

menuju sistem digital bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak, karena kecepatan, akurasi, dan kelangsungan data menjadi elemen yang sangat penting dalam mendukung tata kelola yang efisien dan efektif (Putri & Santoso, 2022; Rahmawati et al., 2023; Kurniawan, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang pengelolaan arsip dinamis di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami fenomena digitalisasi arsip dari perspektif praktik lapangan, bukan sekadar pengujian hipotesis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara rinci proses pengelolaan arsip, implementasi sistem digital, serta hambatan dan tantangan yang muncul. Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan tekstual, dianalisis melalui interpretasi kontekstual terhadap kondisi sosial dan operasional di lingkungan dinas tersebut.

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan (Maret-Mei 2025) di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, bersamaan dengan kegiatan magang peneliti. Data diperoleh melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipatif pasif yang memungkinkan peneliti menyaksikan langsung proses pengelolaan arsip manual dan digital, termasuk penggunaan aplikasi SRIKANDI, tanpa terlibat dalam operasional. Observasi ini mencatat berbagai aspek seperti prosedur klasifikasi arsip, kendala teknis, respons pegawai terhadap digitalisasi, serta kondisi infrastruktur pendukung.

Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan berbagai narasumber kunci seperti arsiparis, operator sistem, kepala seksi, dan staf administratif. Wawancara ini menggali pemahaman konseptual, pengalaman praktis, kendala subjektif, serta harapan para pelaku terhadap sistem pengelolaan arsip. Ketiga, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen pendukung seperti SOP, jadwal retensi arsip, kebijakan digitalisasi, serta peraturan perundang-undangan terkait.

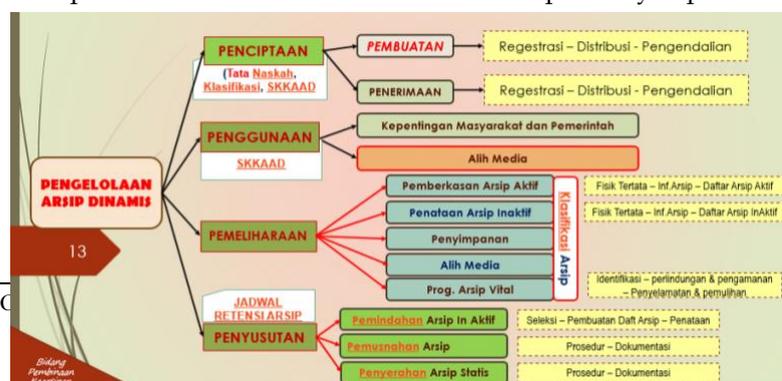
Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan dan mencocokkan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumen. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman komprehensif tentang realitas pengelolaan arsip dinamis sekaligus mengungkap tantangan aktual dalam transformasi digital kearsipan. Melalui kombinasi metode pengumpulan data ini, penelitian berhasil merekonstruksi proses pengelolaan arsip secara utuh, mulai dari tataran kebijakan hingga implementasi teknis di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Pengelolaan Arsip Dinamis

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan arsip, baik arsip statis maupun arsip dinamis. Fokus penelitian ini berada pada arsip dinamis, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi dalam kegiatan administrasi organisasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengelolaan arsip dinamis di instansi ini telah dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku, namun masih dalam proses transisi dari sistem manual ke digital.

Perubahan sistem menuju digitalisasi ditandai dengan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang diluncurkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sejak 2020. Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan naskah dinas secara elektronik di seluruh instansi pemerintahan. Meskipun telah diperkenalkan, adopsi dan implementasi aplikasi ini di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya optimal.



Gambar 1. Pengelolaan Arsip Daerah

B. Proses Pengelolaan Arsip Dinamis

1. penciptaan arsip
Arsip dibuat melalui aktivitas administrasi seperti surat, nota, dan laporan, dengan mengacu pada Tata Naskah Dinas (TND).
2. penggunaan dan pemberkasan
Arsip digunakan dalam proses kerja dan diberkaskan berdasarkan kode, jenis dokumen, dan unit kerja agar mudah ditemukan dan tersimpan sistematis (Putra & Handayani, 2022).
3. Penyimpanan
Arsip aktif disimpan di unit pengolah, sementara arsip inaktif dipindahkan ke unit kearsipan dengan sistem penyimpanan kronologis, abjad, atau subjek.
4. Pemeliharaan
Dinas melakukan pemeliharaan rutin seperti fumigasi dan pengendalian suhu agar arsip terjaga dari kerusakan (Wijaya, 2023).
5. Penyusutan
Arsip yang tidak aktif disusutkan dengan pemindahan, pemusnahan setelah masa retensi habis, atau penyerahan ke lembaga kearsipan.
6. Ahli media
Arsip fisik dialihkan ke format digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data, khususnya dokumen penting (Kurniawan, 2022).

C. Implementasi Sistem Digital (Aplikasi SRIKANDI)

Dalam rangka mendukung transformasi digital, pemerintah pusat telah mewajibkan penggunaan aplikasi SRIKANDI di seluruh instansi pemerintahan sejak 2021. Di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, aplikasi ini digunakan untuk mencatat naskah dinas elektronik, proses disposisi, serta pengarsipan otomatis.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai dan arsiparis, implementasi aplikasi ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti:

1. Masih ada kegiatan surat-menyurat dan pemberkasan yang dilakukan secara manual.
2. Aplikasi kadang mengalami gangguan teknis atau keterbatasan akses karena jaringan internet yang tidak stabil.

Temuan ini sejalan dengan Rofiqoh (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi arsip membutuhkan kesiapan perangkat, pelatihan SDM, dan dukungan regulasi internal agar dapat berjalan optimal.

D. Evaluasi Efektivitas dan Identifikasi Hambatan

Implementasi sistem digitalisasi arsip dihadapkan pada beberapa kendala utama. Pertama, sumber daya manusia sebagian besar belum terlatih dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI sehingga kesulitan dalam pengelolaan arsip digital (Aulia, 2023). Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti komputer, scanner, dan jaringan internet memperlambat proses digitalisasi (Nurhadi & Riyadi, 2022). Ketiga, resistensi budaya kerja manual menyebabkan pegawai enggan beralih ke sistem digital. Terakhir, kurangnya integrasi SRIKANDI dengan sistem lain di instansi menyebabkan duplikasi kerja dan hambatan aliran data arsip (Rahmawati et al., 2023).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan arsip dinamis di Dinas Kearsipan telah dilaksanakan sesuai pedoman perundangan. Namun, efektivitas implementasi sistem digital seperti SRIKANDI belum maksimal. Faktor utama yang menghambat adalah kesiapan SDM dan infrastruktur.

Hal ini diperkuat oleh temuan Putri & Santoso (2022), yang menyatakan bahwa digitalisasi arsip bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga memerlukan perubahan budaya organisasi, pelatihan rutin, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip dinamis berbasis digital, perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan berkala untuk semua pegawai.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pembaruan perangkat dan jaringan.
3. Menyusun SOP yang selaras dengan sistem digital.
4. Mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan transformasi digital arsip.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penurunan performa oil purifier di Kapal KM. Lambemu disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, serta terdapat sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja lubricating oil purifier antara lain berkaitan dengan metode perawatan yang tidak sesuai. Perawatan yang tidak dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jadwal dalam manual book menyebabkan beberapa komponen penting, seperti bowl disc dan jalur fresh water purifier, tidak dibersihkan secara berkala, sehingga menurunkan efisiensi sistem. Selain itu, pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) juga menjadi penyebab utama. Operator seringkali lalai dalam memastikan bahwa proses pengoperasian berjalan sebagaimana mestinya, khususnya dalam hal menjaga kebersihan bowl disc dan kelancaran aliran air segar.

Faktor lain yang turut berperan adalah kondisi material, khususnya pada pipa yang telah lama digunakan tanpa dilakukan perawatan atau penggantian. Hal ini menyebabkan ketahanan pipa terhadap korosi menurun, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap sistem oil purifier secara keseluruhan. Di samping itu, faktor usia mesin juga tidak dapat diabaikan. Lubricating oil purifier yang telah beroperasi dalam jangka waktu lama cenderung mengalami penurunan efisiensi, baik dari sisi performa maupun keandalan sistem.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa upaya telah dilakukan guna mengoptimalkan kembali kinerja oil purifier. Salah satunya adalah dengan melakukan perawatan rutin sesuai dengan jam kerja mesin, termasuk pengecekan dan pembersihan setiap komponen secara menyeluruh. Di samping itu, pelaksanaan pertemuan rutin atau toolbox meeting juga diadakan dengan tujuan membahas kondisi terkini dari oil purifier, baik sebelum maupun sesudah dilakukan perawatan. Seluruh aktivitas perawatan dan perbaikan dicatat dalam logbook sebagai dasar pemantauan pola kerusakan dan penurunan performa. Langkah ini penting agar tim operasional dapat mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan dan merumuskan strategi perawatan yang lebih efisien untuk masa mendatang. Dengan kombinasi antara perawatan terjadwal, pemantauan berkala, dan peningkatan kedisiplinan dalam pengoperasian sesuai SOP, diharapkan performa oil purifier di Kapal KM. Lambemu dapat kembali optimal dan beroperasi secara andal.

REFERENSI

- Kurniawan, A. (2022). Digitalisasi Arsip Pemerintah: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 112-120.
- Nasution, R. (2024). Peran Strategis Dinas Kearsipan dalam Tata Kelola Arsip Dinamis. *Jurnal Kearsipan dan Informasi Publik*, 8(1), 45-58.
- Putri, N. D., & Santoso, R. (2022). Transformasi Digital dalam Layanan Kearsipan Pemerintah Daerah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 33-41.
- Rofiqoh, S. (2022). Efektivitas Aplikasi SRIKANDI dalam Pengelolaan Arsip Pemerintah. *Jurnal Sistem Informasi Negara*, 7(2), 76-88.
- Yuliani, M. (2021). Keamanan dan Aksesibilitas Arsip Digital. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 6(3), 59-66.
- Aulia, N. R. (2023). Kesiapan SDM dalam Implementasi Sistem Kearsipan Digital. *Jurnal Humaniora Digital*, 4(1), 22-30.

- Riyadi, A., & Nurhadi, D. (2022). Evaluasi Infrastruktur Sistem Kearsipan Digital. *Jurnal Infrastruktur Pemerintahan*, 5(2), 101-110.
- Rahmawati, L., Sari, F., & Nugroho, B. (2023). Integrasi Sistem Informasi dalam Pengelolaan Arsip Pemerintah. *Jurnal Manajemen Informasi Publik*, 11(1), 12-20.
- Sari, L., & Wibowo, D. (2022). Standar Operasional Prosedur dalam Transformasi Arsip Digital. *Jurnal Kebijakan Publik dan Reformasi Administrasi*, 5(4), 78-89.
- Hasanah, N., Putra, M. T., & Wijaya, H. (2023). Strategi Peningkatan Kompetensi SDM Kearsipan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 6(1), 39-48.
- Pratama, R., & Nugroho, Y. (2024). Tantangan Digitalisasi Arsip di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Digital*, 3(2), 66-74.